

ABSTRAK

Penjatuan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dibenarkan. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, perlu adanya penelitian tentang penerapan penjatuan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penjatuan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian dengan meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan penjatuan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus dan penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Minimum Khusus, Korupsi, Tindak Pidana

ABSTRACT

The imposition of a criminal under the special minimum criminal sanctions in the Law on the eradication of criminal acts of corruption is basically not justified. Legal issues in this study, there is a need for research on the application of imprisonment under a special minimum sentence regulated by the Corruption Eradication Act and the application of special minimum imprisonment sanctions by judges in decision number 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN .Bdg has complied with Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This writing aims to find out the application of imprisonment under a special minimum penalty regulated by the Corruption Eradication Act and the application of special minimum imprisonment sanctions by judges in decision number 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg is in accordance with Law Number. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 2001 concerning the Eradication of Corruption. This writing is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and examining the object of research through a statutory approach related to the legal issues under study. The results of this study explain the application of imprisonment under a special minimum sentence and the application of special minimum imprisonment sanctions by judges in the decision number 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg is in accordance with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law No. -Law Number 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes..

KARAWANG

Keywords: Special Minimum Criminal Sanctions, Corruption, Crime